



ABSTRAK

Tidak mungkin membahas Aceh tanpa merujuk pada dua peristiwa penting: konflik GAM dan tsunami. Kedua peristiwa ini menjadi katalisator yang mendorong kedua belah pihak untuk berdamai setelah 28 tahun terlibat dalam konflik bersenjata. Namun, di saat yang sama, terjadi ketimpangan fokus kebijakan yang lebih memprioritaskan upaya pemulihan pascatsunami dibandingkan upaya pemulihan pascakonflik. Sebagai konsekuensinya, terdapat dampak gender berupa kekerasan seksual di masa konflik yang tidak dibicarakan. Situasi ini diperparah dengan eksklusi perempuan selama proses perundingan sehingga perempuan tidak menjadi penerima manfaat dari program bina damai. Tesis ini berupaya untuk menelaah secara kritis bahwa perempuan sangat rentan dalam masa konflik dan masa damai karena siklus kekerasan yang terus dilembagakan, namun, juga mengkonfigurasi transformasi bermakna para penyintas untuk pulih. Dengan memanfaatkan sumber penelitian primer serta sekunder dan konsep pemberdayaan milik Naila Kabeer (1999), tesis ini berargumen bahwa perdamaian di Aceh dimaknai secara berbeda oleh laki-laki dan perempuan. Laki-laki melihatnya sebagai akhir konflik bersenjata, pembagian kekuasaan, dan kompensasi material. Sementara itu, perempuan memandang perdamaian lebih kompleks, karena proses bina damai belum inklusif dan kurang mempertimbangkan dampak jangka panjang kekerasan terhadap mereka dalam program pemulihan. Transformasi perempuan penyintas kekerasan seksual di Aceh ditandai dengan pencapaian otonomi domestik yang diikuti oleh aktualisasi peran-peran yang bermakna terhadap sesama di ruang publik. Capaian ini sangat dipengaruhi oleh kapasitas penyintas dalam menentukan dan mewujudkan tujuan hidup baru yang sebagian besar difasilitasi oleh sumber daya sosial.

Kata Kunci: transformasi, agensi, kekerasan seksual, konflik Aceh



ABSTRACT

It is impossible to discuss Aceh without referencing two significant events: the GAM conflict and the tsunami. These two events served as the catalyst that compelled both parties to reconcile after 28 years of armed conflict. Simultaneously, a policy asymmetry existed that favoured post-tsunami recovery efforts over post-conflict rehabilitation efforts. Therefore, the conflict failed to properly acknowledge or deal with the gender-specific effects of sexual violence. The exclusion of women throughout the negotiation process worsened this situation, resulting in women missing out on the benefits of peacebuilding programmes. This thesis aims to critically examine how women are particularly vulnerable in times of conflict and peacetime due to cycles of violence that continue to be institutionalised, while also enabling survivors' meaningful transformation to heal. This thesis employs primary and secondary research sources, drawing on Naila Kabeer's (1999) empowerment concept. It argues that peace in Aceh is interpreted differently by men and women. Men see it as the end of armed conflict, power sharing and material compensation. Meanwhile, women view peace as more complex, as the peacebuilding process has not been inclusive and has not considered the long-term impact of violence on them in recovery programmes. The transformation of women survivors of sexual violence in Aceh is marked by the achievement of domestic autonomy followed by the actualisation of meaningful roles towards others in the public sphere. These achievements are strongly influenced by survivors' capacity to define and realise new life goals that are largely facilitated by social resources.

Keywords: transformation, agency, sexual violence, the Aceh conflict